



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan (1b), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
  - b. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
  - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
  - d. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
  - e. Biaya sewa kendaraan (taksi) dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
  - f. biaya transportasi darat dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (1a) Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.

- (1b) Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Komponen Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* berdasarkan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi dan biaya penginapan ditanggung oleh pengelola/panitia penyelenggara, maka yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 kecuali biaya penginapan.
  - (3) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya seluruhnya ditanggung oleh pengelola/panitia penyelenggara, maka yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.
2. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut;
- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terbagi atas:
    - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan pergi-pulang pada saat hari kerja maupun di luar hari kerja;
    - b. biaya perjalanan bagi aparat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan intern berupa audit, reviu, evaluasi, dan monitoring di Perangkat Daerah;
    - c. perjalanan dinas dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa/Dusun;
  - (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang saku, uang transportasi lokal, dan uang makan;
  - (3) Khusus Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada wilayah Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, dan Kecamatan Matakali, mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila mempunyai dasar berupa Surat Undangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Rapat;
  - (4) Rincian biaya perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c tercantum dalam lampiran VII, XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Kategori atau pembagian desa sesuai jarak dan kondisi tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan ini.
  - (6) Kategori atau pembagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikelompokkan sebagai berikut:
    - a. Desa dekat dengan jarak 0 s.d 10 Km dari Ibu Kota kecamatan;
    - b. Desa sedang dengan jarak 10 s.d 20 Km dari Ibu Kota kecamatan; dan
    - c. Desa jauh dengan jarak di atas 20 Km dari Ibu Kota kecamatan.

- (7) Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Komponen Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* berdasarkan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan (1b), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap melampirkan dokumen berupa :
- a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan (taksi) berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - f. dalam hal bukti pembayaran tidak ada sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e diwajibkan menggunakan format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, format sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - h. rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1a) Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat 1B, dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melampirkan dokumen berupa:
- a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas;
  - e. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, format sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - f. rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1b) Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran XV dan XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam SPPD tidak diperkenankan ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan.
  - (3) Untuk keadaan *force majeure*, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
  - (4) dalam hal *boarding pass* pergi atau pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hilang, wajib dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan surat keterangan dari atasan atau personil yang bersama melakukan perjalanan dinas.
4. Ketentuan Satuan Biaya Uang Harian, Satuan Biaya Uang Representasi, Satuan Biaya Penginapan, Satuan Biaya Tiket Pesawat (PP), dan Satuan Biaya Sewa Kendaraan (Taksi) bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV ditambahkan 2 (dua) lampiran yakni lampiran XV dan lampiran XVI sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 7 November 2023  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 32



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 November 2023

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 32 TAHUN 2023  
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2023

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR DAERAH (Rp)</b>	<b>DIKLAT (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	ACEH	OH	360,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	130,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	120,000
17	BALI	OH	480,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	110,000
31	MALUKU	OH	380,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	130,000
33	PAPUA	OH	580,000	170,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	140,000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480,000	140,000
36	PAPUA TENGAH	OH	580,000	170,000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR DAERAH (Rp)</b>	<b>DIKLAT (Rp)</b>
37	PAPUA SELATAN	OH	580,000	170,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580,000	170,000

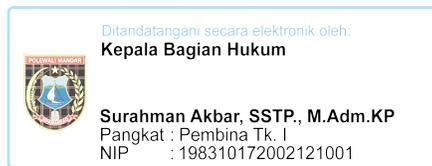
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 November 2023



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2023

**SATUAN BIAYA UANG PRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON II**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR KOTA (Rp)</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	OH	250,000	125,000
2	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	OH	150,000	75,000

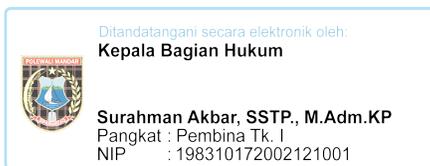
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 November 2023



**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 ANTAR PROVINSI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN				
			Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	PNS Gol II/I/PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	Rp 4,420,000	Rp 3,526,000	Rp 1,533,000	Rp 770,000	Rp 770,000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4,960,000	Rp 2,195,000	Rp 1,100,000	Rp 699,000	Rp 699,000
3	RIAU	OH	Rp 3,820,000	Rp 3,119,000	Rp 1,650,000	Rp 852,000	Rp 852,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5,344,000	Rp 2,318,000	Rp 1,297,000	Rp 792,000	Rp 792,000
5	JAMBI	OH	Rp 5,000,000	Rp 4,102,000	Rp 1,225,000	Rp 580,000	Rp 580,000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5,236,000	Rp 3,332,000	Rp 1,353,000	Rp 701,000	Rp 701,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5,850,000	Rp 3,083,000	Rp 1,955,000	Rp 861,000	Rp 861,000
8	LAMPUNG	OH	Rp 4,491,000	Rp 2,488,000	Rp 1,425,000	Rp 580,000	Rp 580,000
9	BENGKULU	OH	Rp 2,140,000	Rp 1,628,000	Rp 1,546,000	Rp 692,000	Rp 692,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3,827,000	Rp 2,838,000	Rp 1,957,000	Rp 649,000	Rp 649,000
11	BANTEN	OH	Rp 5,725,000	Rp 2,373,000	Rp 1,204,000	Rp 724,000	Rp 724,000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5,381,000	Rp 2,755,000	Rp 1,201,000	Rp 686,000	Rp 686,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8,720,000	Rp 2,063,000	Rp 992,000	Rp 730,000	Rp 730,000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5,303,000	Rp 1,850,000	Rp 1,201,000	Rp 750,000	Rp 750,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5,017,000	Rp 2,695,000	Rp 1,384,000	Rp 845,000	Rp 845,000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4,449,000	Rp 2,007,000	Rp 1,153,000	Rp 814,000	Rp 814,000
17	BALI	OH	Rp 6,848,000	Rp 2,433,000	Rp 1,685,000	Rp 1,138,000	Rp 1,138,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4,375,000	Rp 2,648,000	Rp 1,418,000	Rp 907,000	Rp 907,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3,750,000	Rp 2,133,000	Rp 1,355,000	Rp 688,000	Rp 688,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2,654,000	Rp 1,923,000	Rp 1,125,000	Rp 538,000	Rp 538,000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN				
			Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	PNS Gol II/I/PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4,901,000	Rp 3,391,000	Rp 1,160,000	Rp 659,000	Rp 659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4,797,000	Rp 3,316,000	Rp 1,500,000	Rp 697,000	Rp 697,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4,000,000	Rp 2,188,000	Rp 1,507,000	Rp 804,000	Rp 804,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4,000,000	Rp 2,735,000	Rp 1,507,000	Rp 904,000	Rp 904,000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4,919,000	Rp 2,290,000	Rp 1,207,000	Rp 978,000	Rp 978,000
26	GORONTALO	OH	Rp 4,168,000	Rp 3,107,000	Rp 1,606,000	Rp 955,000	Rp 955,000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4,076,000	Rp 3,098,000	Rp 1,344,000	Rp 704,000	Rp 704,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4,820,000	Rp 1,938,000	Rp 1,423,000	Rp 745,000	Rp 745,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2,309,000	Rp 2,027,000	Rp 1,679,000	Rp 951,000	Rp 951,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3,088,800	Rp 2,574,000	Rp 1,297,000	Rp 786,000	Rp 786,000
31	MALUKU	OH	Rp 3,467,000	Rp 3,240,000	Rp 1,059,000	Rp 667,000	Rp 667,000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4,611,600	Rp 3,843,000	Rp 1,160,000	Rp 605,000	Rp 605,000
33	PAPUA	OH	Rp 3,859,000	Rp 3,318,000	Rp 2,521,000	Rp 1,038,000	Rp 1,038,000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3,872,000	Rp 3,341,000	Rp 2,056,000	Rp 967,000	Rp 967,000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3,872,000	Rp 3,341,000	Rp 2,056,000	Rp 967,000	Rp 967,000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3,859,000	Rp 3,318,000	Rp 2,521,000	Rp 1,038,000	Rp 1,038,000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5,673,000	Rp 4,877,000	Rp 3,706,000	Rp 1,526,000	Rp 1,526,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5,711,000	Rp 4,911,000	Rp 3,731,000	Rp 1,536,000	Rp 1,536,000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 November 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT (PP)  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH ANTAR PROVINSI  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO.	PROVINSI	TIKET PESAWAT (PP)	
		Kelas Bisnis (Rp)	Kelas Ekonomi (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	12,760,000	6,781,000
2	SUMATERA UTARA	12,514,000	6,172,000
3	RIAU	13,207,000	6,845,000
4	KEPULAUAN RIAU	10,375,000	5,337,000
5	JAMBI	9,659,000	4,952,000
6	SUMATERA BARAT	10,974,000	5,402,000
7	SUMATERA SELATAN	9,466,000	4,781,000
8	LAMPUNG	8,161,000	4,161,000
9	BENGKULU	11,808,000	6,450,000
10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9,060,000	4,663,000
11	BANTEN	7,444,000	3,829,000
12	JAWA BARAT	7,444,000	3,829,000
13	D.K.I. JAKARTA (MAKASSAR)	7,444,000	3,829,000
14	D.K.I. JAKARTA (MAMUJU)	7,295,000	4,867,000
15	JAWA TENGAH	9,466,000	4,706,000
16	D.I. YOGYAKARTA	6,525,000	3,893,000
17	JAWA TIMUR	5,936,000	3,433,000
18	BALI	4,182,000	2,631,000
19	NUSA TENGARA BARAT	4,717,000	2,909,000
20	NUSA TENGGARA TIMUR	7,637,000	4,311,000
21	KALIMANTAN BARAT	9,915,000	5,241,000
22	KALIMANTAN TENGAH	12,428,000	6,813,000
23	KALIMANTAN SELATAN	12,696,000	6,824,000
24	KALIMANTAN TIMUR	12,664,000	6,150,000
25	SULAWESI UTARA	5,327,000	2,909,000
26	SULAWESI TENGAH	4,268,000	2,578,000
27	SULAWESI TENGGARA	2,663,000	1,786,000
28	MALUKU	6,022,000	3,455,000
29	PAPUA	10,193,000	5,787,000
30	PAPUA BARAT	8,493,000	4,931,000

NO.	PROVINSI	TIKET PESAWAT (PP)	
		Kelas Bisnis (Rp)	Kelas Ekonomi (Rp)
31	TIMIKA	11,723,000	6,567,000
32	MALANG	10,129,000	5,166,000
33	SOLO	9,466,000	4,845,000

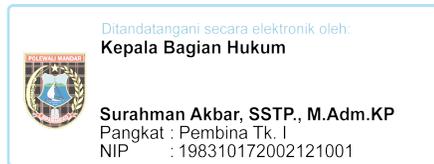
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 November 2023



**SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (TAKSI) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	ACEH	orang/PP	254,000
2	SUMATERA UTARA	orang/PP	616,000
3	RIAU	orang/PP	202,000
4	KEPULAUAN RIAU	orang/PP	330,000
5	JAMBI	orang/PP	294,000
6	SUMATERA BARAT	orang/PP	380,000
7	SUMATERA SELATAN	orang/PP	358,000
8	LAMPUNG	orang/PP	336,000
9	BENGGKULU	orang/PP	218,000
10	BANGKA BELITUNG	orang/PP	194,000
11	BANTEN	orang/PP	1,072,000
12	JAWA BARAT	orang/PP	400,000
13	D.K.I. JAKARTA	orang/PP	512,000
14	JAWA TENGAH	orang/PP	216,000
15	D.I. YOGYAKARTA	orang/PP	534,000
16	JAWA TIMUR	orang/PP	466,000
17	BALI	orang/PP	454,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	orang/PP	462,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	orang/PP	232,000
20	KALIMANTAN BARAT	orang/PP	342,000
21	KALIMANTAN TENGAH	orang/PP	268,000
22	KALIMANTAN SELATAN	orang/PP	360,000
23	KALIMANTAN TIMUR	orang/PP	1,066,000
24	KALIMANTAN UTARA	orang/PP	436,000
25	SULAWESI UTARA	orang/PP	276,000
26	GORONTALO	orang/PP	530,000
27	SULAWESI BARAT	orang/PP	626,000
28	SULAWESI SELATAN	orang/PP	374,000
29	SULAWESI TENGAH	orang/PP	330,000
30	SULAWESI TENGGARA	orang/PP	342,000
31	MALUKU	orang/PP	576,000
32	MALUKU UTARA	orang/PP	430,000
33	PAPUA	orang/PP	1,026,000
34	PAPUA BARAT	orang/PP	472,000
35	PAPUA BARAT DAYA	orang/PP	472,000
36	PAPUA TENGAH	orang/PP	1,026,000

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
37	PAPUA SELATAN	orang/PP	1,026,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	orang/PP	1,026,000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum



Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 198310172002121001

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS ANTAR PROVINSI  
 BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI/KABUPATEN</b>	<b>KABUPATEN / KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>SULAWESI BARAT</b>			
1	Polewali Mandar	Mamuju	Orang/PP	260,000
2	Polewali Mandar	Majene	Orang/PP	140,000
3	Polewali Mandar	Mamasa	Orang/PP	260,000
4	Polewali Mandar	Mamuju Tengah	Orang/PP	340,000
5	Polewali Mandar	Mamuju Utara	Orang/PP	500,000
	<b>SULAWESI SELATAN</b>			
1	Polewali Mandar	Makassar	Orang/PP	320,000
2	Polewali Mandar	Bantaeng	Orang/PP	520,000
3	Polewali Mandar	Barru	Orang/PP	200,000
4	Polewali Mandar	Bone	Orang/PP	300,000
5	Polewali Mandar	Bulukumba	Orang/PP	560,000
6	Polewali Mandar	Enrekang	Orang/PP	260,000
7	Polewali Mandar	Gowa	Orang/PP	360,000
8	Polewali Mandar	Jeneponto	Orang/PP	480,000
9	Polewali Mandar	Luwu	Orang/PP	360,000
10	Polewali Mandar	Luwu Timur	Orang/PP	440,000
11	Polewali Mandar	Luwu Utara	Orang/PP	500,000
12	Polewali Mandar	Maros	Orang/PP	260,000
13	Polewali Mandar	Sengkang	Orang/PP	300,000
14	Polewali Mandar	Sidrap	Orang/PP	260,000
15	Polewali Mandar	Sinjai	Orang/PP	620,000
16	Polewali Mandar	Soppeng	Orang/PP	300,000
17	Polewali Mandar	Takalar	Orang/PP	360,000
18	Polewali Mandar	Tana Toraja	Orang/PP	320,000
19	Polewali Mandar	Toraja Utara	Orang/PP	360,000
20	Polewali Mandar	Wajo	Orang/PP	300,000
21	Polewali Mandar	Pangkep	Orang/PP	220,000

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI/KABUPATEN</b>	<b>KABUPATEN / KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
22	Polewali Mandar	Pinrang	Orang/PP	140,000
23	Polewali Mandar	Palopo	Orang/PP	320,000
24	Polewali Mandar	Pare-Pare	Orang/PP	180,000
	<b>SULAWESI TENGAH</b>			
1	Polewali Mandar	Palu	Orang/PP	1,200,000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 November 2023





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**PERANGKAT DAERAH**

Alamat .....

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp. ....

Terbilang : ..... Rupiah

Untuk pengeluaran: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

.....  
dengan rincian:

1. uang harian : Rp. ....
2. biaya transportasi : Rp. ....
3. biaya penginapan : Rp. ....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp. ....
5. biaya taksi : Rp. ....

....., ..... 20

Penerima

Materai ttd  
10.000

Menyetujui

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran  
Pembantu

ttd

ttd

.....  
NIP



.....  
NIP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 November 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**PERANGKAT DAERAH**  
Alamat .....

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal ..... s.d .....
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai  
10.000



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 November 2023

